

**EVALUASI PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA
(KUBE) DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI
KECAMATAN SAMARINDA UTARA
KOTA SAMARINDA**

Juliyanti Asdar, Aji Ratna Kusuma

**eJournal Administrasi Publik
Volume 12, Nomor 4, 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Mengatasi Kemiskinan di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda.

Pengarang : Juliyanti Asdar

NIM : 2002016094

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 15 November 2024

Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si
NIP. 19590308 198403 2 001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik	
Volume	: 12	
Nomor	: 4	
Tahun	: 2024	
Halaman	: 1280-1290	
		Koordinator Program Studi Administrasi Publik <u>Dr. Fajar Apriani, M.Si.</u> NIP 19830414 200501 2 003

EVALUASI PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI KECAMATAN SAMARINDA UTARA KOTA SAMARINDA

Juliyanti Asdar ¹, Aji Ratna Kusuma ²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan program KUBE dan mengetahui faktor penghambat pelaksanaan program KUBE dalam mengatasi kemiskinan di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda. Adapun jenis penelitian ini ialah deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian ialah evaluasi program KUBE di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda menurut Bridgman dan Davis yaitu: input (masukan), process (proses), output (luaran atau hasil) dan outcomes (dampak) serta faktor penghambat pelaksanaan program KUBE. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi serta menggunakan teknik analisis data model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi program KUBE belum mampu mengatasi kemiskinan di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, namun cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota. Hal ini berdasarkan indikator masukan yaitu: sumber daya manusia pelaksana program KUBE, anggaran dan infrastruktur pendukung seperti tempat belum optimal, karena terbatasnya anggaran dan tempat yang belum disediakan. Proses pelaksanaan program KUBE berjalan cukup baik, adanya proses pelatihan dan pendampingan. Namun, hasil pelaksanaan program dan dampaknya belum optimal dan belum signifikan terhadap perubahan kehidupan anggota hanya terhadap pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Faktor penghambat dalam pelaksanaan program ialah terbatasnya modal, pencairan bantuan melalui KUBE tidak rutin dan kurang aktif, kurang semangat serta kurang kreatifnya anggota dalam mengembangkan usaha.

Kata Kunci : *Evaluasi Program, KUBE, Kemiskinan*

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang dihadapi hampir seluruh kota di Indonesia dan Kota Samarinda adalah salah satunya. Masalah kemiskinan di Kota Samarinda tidak kunjung selesai bahkan meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, masalah kemiskinan memerlukan penanganan yang lebih lanjut.

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: juliyanti.asdar02@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Kemiskinan ini menjadi masalah utama dan mendasar yang menjadi perhatian pemerintah.

Kota Samarinda terdiri dari sepuluh kecamatan yaitu: Kecamatan Palaran, Loa Janan Ilir, Sambutan, Sungai Kunjang, Sungai Pinang, Samarinda Seberang, Samarinda Kota, Samarinda Ulu, Samarinda Ilir dan Samarinda Utara. Kecamatan Samarinda Utara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 merupakan kecamatan yang memiliki penduduk miskin terbanyak dibandingkan kecamatan lain yaitu berjumlah 1.166 jiwa penduduk miskin. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Samarinda membuat program untuk penanganan kemiskinan yaitu KUBE.

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan program pemerintah yang sasarannya ialah masyarakat kurang mampu atau miskin yang memiliki potensi dan kemampuan untuk menjalankan usaha bersama. Masyarakat kurang mampu tersebut dibina oleh Dinas Sosial dan ditempatkan pada KUBE untuk mengelola usaha secara bersama-sama sebagai sarana meningkatkan perekonomian. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan dalam KUBE diantaranya: sebagai tempat pencairan bantuan sosial nontunai dari Pemerintah, tempat menjual kebutuhan pokok rumah tangga dan bahan pangan murah serta tempat pemasaran hasil produksi KUBE.

Program KUBE dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Samarinda sesuai pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin. Namun, dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan program KUBE diantaranya: terbatasnya dana dalam menjalankan program, kurang aktifnya anggota dalam menjalankan modal dan usaha yang diberikan oleh Dinas Sosial, terbatasnya sumber daya manusia yang terampil dan kreatif dalam mengelola keuangan serta KUBE yang pasif, karena saat ini pencairan bantuan nontunai berupa sembako tidak lagi disalurkan melalui KUBE, melainkan melalui bank sehingga KUBE yang dibentuk tidak mendapat banyak keuntungan.

Masih adanya berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program KUBE di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, maka selanjutnya masalah tersebut perlu dikaji berhubungan dengan konsep evaluasi kebijakan publik dan evaluasi program. Konsep evaluasi ini digunakan, karena akan melihat dan menilai sejauh mana program KUBE telah dilaksanakan dengan melakukan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan target atau tujuan yang telah ditentukan. Melihat banyaknya penduduk miskin di Kecamatan Samarinda Utara, sementara itu Pemerintah telah meluncurkan program untuk mengatasi kemiskinan yaitu: KUBE, sehingga penulis tertarik untuk meneliti terkait evaluasi program Kelompok Usaha Bersama dalam mengatasi kemiskinan di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program.

Kerangka Dasar Teori

Kemiskinan

Istilah kemiskinan berarti kurangnya kenikmatan dalam hidup dan tidak meratanya persediaan kebutuhan. Hal ini diartikan sebagai keterbatasan untuk menjaga kinerja fisik dan situasi ekonomi di mana kelompok atau individu memiliki pilihan dan peluang yang terbatas untuk mengakses sumber daya yang tersedia. Kemiskinan merupakan suatu permasalahan multidimensi artinya tidak hanya berkaitan dengan dimensi pendapatan dan pengeluaran saja tetapi juga dimensi pendidikan, tempat tinggal, kesehatan dan standar hidup. Kemiskinan dapat disebabkan oleh rendahnya pendapatan, rendahnya pendidikan, terbatasnya lapangan pekerjaan dan terbatasnya sumber daya alam maupun manusia.

Menurut *World Bank* (2015) menjelaskan bahwa kemiskinan adalah keadaan individu yang tidak dapat menikmati berbagai pilihan dan kesempatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini mencakup ketidakmampuan untuk mencapai standar hidup yang layak, menjaga kesehatan, merasakan kebebasan, memiliki harga diri serta mendapatkan rasa hormat oleh orang lain. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (2017) menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan keadaan masyarakat yang tidak mampu mewujudkan hak-hak dasar dalam mempertahankan dan meningkatkan kehidupan yang berkualitas. Adapun hak-hak dasar ini mencakup pemenuhan kebutuhan akan makanan, kesehatan, tempat tinggal, pekerjaan, pakaian, pendidikan, air bersih, keamanan, pertahanan, hak dalam kehidupan sosial dan politik serta akses terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup. Menurut Maipita (2014), menjelaskan bahwa kemiskinan ialah ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup suatu masyarakat. Keadaan ketidakmampuan ini dilihat dari pendapatan yang rendah dalam memenuhi kebutuhan dasar pangan, sandang, dan papan. Pendapatan yang rendah tidak hanya menyebabkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar secara memadai, namun juga ketidakmampuan untuk mempertahankan standar hidup seperti standar kesehatan dan pendidikan.

Berdasarkan beberapa pengertian dari kemiskinan dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah suatu kondisi ketika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar dalam hidup seperti kebutuhan terhadap pangan, sandang, papan, kesehatan serta pendidikan. Selain itu, kemiskinan juga diartikan sebagai suatu keadaan di mana pendapatan seseorang rendah dan tidak mencukupi dalam memenuhi kebutuhan dasar sehingga sulit menjamin keberlangsungan hidupnya.

Kebijakan Publik

Dye dalam Igrisa (2022) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan setiap tindakan pemerintah yang dipilih untuk melakukan ataupun tidak melakukan (“*is whatever government choose to do or not to do*”). Dengan demikian, diartikan bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan atau pelaksanaan oleh pemerintah termasuk juga yang tidak dilakukan oleh pemerintah dan tidak hanya sekedar keinginan pemerintah saja. Adapun pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu termasuk kebijakan juga, karena berdampak

serupa dengan yang dilakukan oleh pemerintah. Suatu kebijakan publik berarti bentuk keputusan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk menyelesaikan masalah publik. Menurut Woll dalam Tangkilisan (2003:2) menjelaskan bahwa kebijakan publik ialah serangkaian kegiatan pemerintah untuk menyelesaikan suatu masalah di masyarakat secara langsung atau dengan lembaga yang berpengaruh terhadap masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik mengacu pada suatu perwujudan tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh Pemerintah dengan menggunakan sumber daya yang telah tersedia dalam menyelesaikan masalah yang berisi tujuan dan nilai-nilai sosial masyarakat.

Evaluasi Program

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Suarga (2019), evaluasi adalah penilaian. Evaluasi dapat dipahami sebagai proses dalam menilai suatu hal berdasarkan kriteria atau indikator tertentu. Thoha (2003) menjelaskan bahwa evaluasi adalah aktivitas yang direncanakan untuk menilai kondisi suatu objek dengan memanfaatkan instrumen serta membandingkan hasilnya dengan tolak ukur yang ada untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Hasil evaluasi nantinya sebagai tolak ukur sesuai dengan tujuan, rencana serta pengambilan keputusan untuk langkah kedepannya. Evaluasi juga merupakan proses pengukuran dan penilaian. Pengukuran mengacu pada proses membandingkan sesuatu dengan ukuran tertentu. Sementara itu, penilaian berarti membuat keputusan mengenai sesuatu berdasarkan ukuran baik atau buruk. Adapun program merupakan suatu kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Arikunto (2009:297) menjelaskan bahwa evaluasi program adalah serangkaian tindakan yang secara sengaja dilakukan untuk melihat dan menilai tingkat keberhasilan dari suatu program yang telah direncanakan. Evaluasi program juga dapat diartikan sebagai upaya untuk menyediakan informasi dalam menentukan alternatif keputusan. Dengan demikian, disimpulkan bahwa evaluasi program adalah tindakan mengumpulkan informasi atau data yang bertujuan untuk menilai sejauh mana program telah berhasil dilaksanakan dan nantinya hasil tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan alternatif kebijakan untuk program selanjutnya.

Setiap evaluasi menggunakan indikator/kriteria sebagai arahan bagi *evaluator* untuk melakukan penilaian terhadap program. Indikator yang digunakan menjadi landasan dalam menentukan apakah program dapat dikatakan berhasil. Bridgman & Davis (2000:130) menyebutkan bahwa kriteria atau indikator dari suatu evaluasi program yaitu:

1) *Input* (Masukan)

Indikator *input* (masukan) berfokus pada penilaian sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan suatu program. Indikator ini meliputi: sumber daya manusia, anggaran maupun infrastruktur pendukung lainnya.

2) *Process* (Proses)

Indikator *process* berfokus pada suatu proses pelaksanaan dari kebijakan atau program yang ditransformasikan menjadi bentuk pelayanan diberikan langsung kepada masyarakat. Indikator proses dilihat dari metode yang digunakan dalam melaksanakan suatu program.

3) *Output* (Luaran atau Hasil)

Indikator *output* berfokus pada penilaian hasil dari sistem atau proses pelaksanaan kebijakan publik dan program. Indikator *output* terlihat dari apakah suatu program yang dilaksanakan telah menghasilkan keuntungan atau tujuannya telah tercapai.

4) *Outcomes* (Dampak)

Indikator *outcomes* berfokus pada pengaruh dampak yang di dapat oleh masyarakat ataupun pemangku kepentingan yang terkena dampak dari suatu program atau kebijakan. Dengan indikator *outcomes* dapat diketahui apakah hasil yang telah diperoleh dapat memberikan dampak bagi pelaksana program.

Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Program ini merupakan sekian dari banyaknya program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Samarinda dalam mengatasi kemiskinan yang terjadi. Dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin menjelaskan bahwa KUBE ialah kelompok keluarga miskin atau kurang mampu yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya sendiri dalam menjalankan suatu usaha ekonomi produktif untuk menambah pendapatan anggota.

Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia (2008), KUBE merupakan perkumpulan warga kurang mampu yang terbentuk, hidup dan berkembang dengan inisiatifnya serta saling berkaitan di dalam suatu lingkungan. Hal ini tujuannya untuk menambah produktivitas atau kreativitas anggota, meningkatkan relasi interpersonal, meningkatkan kerukunan antar sosial, membantu memenuhi kebutuhan anggota hingga menyelesaikan masalah yang dihadapi serta sebagai wadah untuk menjalankan usaha secara bersama. Menurut Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia (2009), KUBE merupakan sekelompok masyarakat miskin atau kurang mampu yang terdiri dari lima hingga sepuluh keluarga atau lebih yang melakukan kegiatan ekonomi produktif dan komersial, kesejahteraan sosial, bersatu dan kooperatif dan saling membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial anggota.

Berdasarkan beberapa penjelasan terkait KUBE, dapat disimpulkan bahwa KUBE merupakan suatu kumpulan masyarakat dan keluarga kurang mampu yang didorong dalam kegiatan masyarakat dan diwadahi oleh Dinas Sosial untuk menjalankan usaha ekonomi produktif bersama-sama dengan anggota lainnya bertujuan sebagai sarana meningkatkan taraf hidup.

Definisi Konseptual

Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam mengatasi kemiskinan adalah suatu proses untuk menilai atau melihat keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan program KUBE dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan program untuk mengatasi kemiskinan berdasarkan indikator evaluasi program oleh Bridgman dan Davis (2000) antara lain: *input* (masukan), *process* (proses), *output* (luaran/hasil) dan *outcomes* (dampak).

Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian ialah sebagai berikut :

1. Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam mengatasi kemiskinan di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda menggunakan indikator evaluasi menurut Bridgman dan Davis (2000) yaitu: *input* (masukan), *process* (proses), *output* (luaran atau hasil) dan *outcomes* (dampak).
2. Faktor penghambat pelaksanaan Program KUBE dalam mengatasi kemiskinan di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda.

Sumber data primer berasal dari wawancara dengan key informan yaitu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dari Dinas Sosial Kota Samarinda serta Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial dari Dinas Sosial Kota Samarinda. Narasumber lainnya yaitu pendamping KUBE serta anggota atau ketua KUBE di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. Data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, internet, dokumen dan lainnya yang berkaitan dan mendukung penelitian. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis data model interaktif oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Mengatasi Kemiskinan di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda

Program KUBE bertujuan dalam mengatasi kemiskinan di Kecamatan Samarinda Utara. KUBE adalah tempat untuk menjalankan usaha bersama dan sasaran anggotanya ialah masyarakat kurang mampu, miskin atau rentan sosial ekonomi yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau Data Program Penanganan Fakir Miskin, di mana dalam KUBE para anggota secara bersama-sama atau berkelompok mengembangkan suatu usaha, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, serta menciptakan kepedulian dan solidaritas sosial antara anggota dengan masyarakat. KUBE di Kota Samarinda berjumlah 27 dan di Kecamatan Samarinda Utara terdapat 4 KUBE.

Evaluasi program KUBE dalam mengatasi kemiskinan yang ada di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dilihat berdasarkan indikator

evaluasi oleh Bridgman dan Davis (2000) di antaranya: *input*, *process*, *output* dan *outcomes*.

1. Input (Masukan)

Input ialah masukan yang berfokus pada sumber daya pendukung dan bahan dasar yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu program. Indikator *input* mencakup sumber daya manusia, dana dan infrastruktur atau prasarana pendukung lain. Adapun berkaitan dengan program KUBE yang dilaksanakan di Kecamatan Samarinda Utara, *input* dalam hal sumber daya manusia ialah pelaksana program yaitu anggota KUBE yang menjalankan program KUBE, dana atau anggaran sebagai modal usaha dalam menjalankan program dan infrastruktur pendukung seperti bangunan sebagai tempat menjalankan program KUBE dan penunjang kegiatan usaha.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *input* bahwa program Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan Samarinda Utara dalam mengatasi kemiskinan untuk sumber daya manusia, anggaran dan infrastruktur pendukung belum sepenuhnya tercapai. Hal ini ditunjukkan bahwa sumber daya manusia yaitu pengurus atau anggota KUBE telah sesuai pada Peraturan Menteri Sosial RI No 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif kepada KUBE untuk Penanganan Fakir Miskin di mana anggota KUBE merupakan keluarga kurang mampu yang terdapat dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) atau data terpadu penanganan fakir miskin dan berjumlah 10 orang terdiri dari: ketua, sekretaris, bendahara dan anggota serta bertempat tinggal di wilayah yang sama. Namun, anggaran yang diberikan sebagai modal usaha terbatas sehingga anggota sulit untuk mengembangkan usaha KUBE dan infrastruktur pendukung seperti tempat atau bangunan untuk menjalankan program belum disiapkan oleh Dinas Sosial sehingga menggunakan tempat salah satu anggota. Tempat yang digunakan juga terbatas dan tidak cukup luas, sehingga barang-barang jualan yang ada tidak tersusun dengan rapi dan tidak lengkap. Senada dengan yang disebutkan oleh Anggraini, dkk (2022) bahwa warong KUBE yang memiliki keterbatasan dalam luas bangunan atau tempat, maka penyusunan barang-barang yang dijual tidak tersusun rapi, karena sulitnya penataan barang baik untuk lemari ataupun etalase sehingga barang-barang yang ada terlihat tidak beraturan. Hal ini dapat membuat pembeli menjadi tidak nyaman saat berbelanja bahkan kesulitan saat mencari barang yang diperlukan di warong KUBE dan dapat berpengaruh pada pendapatan.

2. Process (Proses)

Indikator proses ini dilihat dari proses pengusulan bantuan KUBE, proses sosialisasi dan pelatihan bagi pendamping juga pengelola KUBE serta jenis usaha atau kegiatan yang dikembangkan oleh KUBE. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa proses program Kelompok Usaha Bersama dalam mengatasi kemiskinan di Kecamatan Samarinda Utara mengenai proses pengusulan bantuan KUBE, proses sosialisasi dan pelatihan bagi pendamping juga pengelola KUBE serta jenis usaha atau kegiatan yang dikembangkan KUBE telah dilaksanakan cukup baik dan memiliki inisiatif. Proses pengusulan bantuan KUBE sudah baik dan terarah, ada

alur proses pengusulan yang jelas. Adanya proses sosialisasi dan pelatihan memberikan pemahaman bagi ketua dan pendamping KUBE dalam menjalankan program walaupun pelatihan tidak untuk semua anggota, nantinya ketua yang akan mengarahkan anggotanya. Jenis usaha atau kegiatan KUBE yang umumnya ialah warong sembako, tetapi anggota KUBE berinisiatif untuk menambah jualan gado-gado dan jualan sembako secara online agar menambah daya tarik masyarakat dan menambah pendapatan.

Menurut Bridgman dan Davis (2000) menyebutkan bahwa proses berfokus pada cara suatu kebijakan atau program ditransformasikan menjadi pelayanan yang langsung diberikan kepada masyarakat. Proses ini dilihat dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan suatu program. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa prosesnya telah berjalan dengan baik sesuai dengan teori Bridgman dan Davis yang melihat proses dari cara pelaksanaan suatu program.

3. Output (Luaran atau Hasil)

Output adalah luaran atau hasil dari pelaksanaan suatu program. Dalam hal pelaksanaan program KUBE ialah jumlah anggota KUBE yang aktif dan mendapat keuntungan serta hasil pelaksanaan program KUBE. Berdasarkan hasil penelitian bahwa hanya beberapa anggota saja yang aktif dan mengelola warong KUBE bahkan dua orang yaitu ketua dan satu anggota dengan alasan punya kesibukan masing-masing. Hasil keuntungan dari pelaksanaan program KUBE cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota seperti: untuk beli sayur, bayar listrik dan jajan anak sekolah, namun belum sepenuhnya meningkatkan ekonomi anggota karena hasil keuntungan tidak di dapat secara rutin dan tidak menentu. Keuntungan tersebut hanya diberikan kepada anggota aktif dan turut berkontribusi saja. Beberapa anggota juga tidak memiliki penghasilan lain sehingga hanya mengharapkan keuntungan dari KUBE.

Menurut Bridgman dan Davis (2000) menjelaskan bahwa *output* berfokus pada penilaian hasil dari sistem atau proses kebijakan publik dan program. Indikator hasil ini dapat dilihat dari apakah program yang dilaksanakan telah menghasilkan keuntungan atau tujuannya telah tercapai. Mengacu pada teori yang dikemukakan oleh teori Bridgman dan Davis dapat disimpulkan bahwa *output* belum sepenuhnya maksimal, karena program KUBE diharapkan dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan anggota kelompok. Namun, hasil keuntungan program KUBE hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota saja dan tidak semua anggota merasakan sejahtera dari pelaksanaan program tersebut.

4. Outcomes (Dampak)

Outcomes adalah dampak yang di dapat dari pelaksanaan program KUBE. Berkaitan dengan program KUBE yang dilaksanakan di Kecamatan Samarinda Utara, *outcomes* dalam hal ini ialah dampak program KUBE terhadap perubahan kehidupan anggota KUBE. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dampak program KUBE ini cukup dirasakan oleh anggota sendiri, seperti dalam pemenuhan

kebutuhan sehari-hari. Namun, belum berdampak terhadap perubahan besar dalam kehidupan anggota, karena pendapatan KUBE tidak menentu.

Bridgman dan Davis (2000) menjelaskan bahwa *outcomes* berfokus pada dampak yang di dapat oleh masyarakat ataupun pemangku kepentingan yang terkena dampak dari kebijakan atau program. Dengan indikator *outcomes* dapat diketahui apakah hasil yang telah diperoleh dapat memberikan dampak bagi pelaksana program. Mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Bridgman dan Davis, dapat disimpulkan bahwa *outcomes* ini belum optimal, karena hasil pelaksanaan program KUBE belum berdampak signifikan terhadap perubahan kehidupan anggota.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Mengatasi Kemiskinan di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda

Dalam pelaksanaan program KUBE terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat yaitu sebagai berikut:

1. Terbatasnya modal yang diberikan untuk mengembangkan usaha KUBE
Anggaran diberikan oleh Dinas Sosial kepada setiap KUBE, namun bagi pengelola KUBE di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda bahwa anggaran ini kurang, sehingga sulit untuk mengembangkan usaha, karena untuk berjualan sembako dan mengisi warung membutuhkan dana yang besar. Hal ini menyebabkan pengelola warung KUBE tidak dapat melengkapi barang dagangannya seperti toko besar lainnya sehingga warung KUBE bisa kalah saing.
2. Kurang aktif dan kurang semangatnya anggota KUBE dalam mengelola warung KUBE juga kurang kreatif dalam mengelola keuangan.
Anggota KUBE kurang aktif dan bersemangat dalam mengelola warung KUBE, karena merasa warung sepi tidak banyak pembeli sehingga tidak memiliki semangat dan memiliki kesibukan masing-masing. Anggota KUBE juga kurang kreatif dalam mengelola keuangan, karena kebanyakan dari mereka tidak berpendidikan tinggi hanya tamat sekolah dasar, sehingga adanya keterbatasan pengetahuan dan mereka hanya membuat pembukuan sederhana.
3. Pencairan bantuan nontunai berupa sembako melalui KUBE tidak menentu dan tidak rutin.
Saat ini, pencairan bantuan nontunai berupa sembako tidak rutin melalui KUBE, karena ada perubahan kebijakan Pemerintah yang mengalihkan pencairan bantuan nontunai tersebut ke dalam bentuk tunai dan disalurkan melalui kantor pos atau bank. Akibatnya, penerima bantuan tidak harus ke KUBE sehingga warung KUBE menjadi sepi dan memperoleh sedikit keuntungan.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan peneliti mengenai evaluasi Program KUBE, maka disimpulkan bahwa :

1. Program KUBE belum sepenuhnya mampu mengatasi kemiskinan di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, namun cukup membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota. Hal ini berdasarkan indikator evaluasi :
 - a) *Input* (Masukan). Program KUBE dalam mengatasi kemiskinan mengenai *input* belum optimal, karena sumber daya manusia yaitu anggota KUBE dan dana atau anggaran sebagai modal telah ditentukan, namun dalam pelaksanaannya anggaran ini terbatas dan infrastruktur pendukung yaitu tempat untuk menjalankan program KUBE belum disiapkan.
 - b) *Process* (Proses). Terkait program KUBE yaitu proses pengusulan bantuan KUBE, proses sosialisasi dan pelatihan bagi pendamping juga pengelola KUBE serta jenis usaha yang dikembangkan KUBE telah dilaksanakan cukup baik dan memiliki inisiatif. Proses pengusulan bantuan mudah dilakukan dan terdapat pelatihan bagi ketua dan pendamping KUBE.
 - c) *Output* (Luaran atau Hasil). Program KUBE dalam mengatasi kemiskinan mengenai *outputnya* belum maksimal, karena hasil keuntungan program KUBE hanya cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota belum sepenuhnya meningkatkan ekonomi anggota. Tidak semua anggota yang mendapat keuntungan tersebut, hanya anggota aktif saja yang mendapat keuntungan.
 - d) *Outcomes* (Dampak). Program KUBE dalam mengatasi kemiskinan mengenai *outcomes* belum optimal karena hasil pelaksanaan program KUBE belum berdampak signifikan terhadap perubahan kehidupan anggota hanya terhadap pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
2. Faktor penghambat pelaksanaan program KUBE dalam mengatasi kemiskinan di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda yaitu: terbatasnya modal yang diberikan untuk mengembangkan usaha KUBE, kurang aktif dan kurang semangatnya anggota KUBE dalam mengelola warong KUBE juga kurang kreatif dalam mengelola keuangan serta pencairan bantuan nontunai berupa sembako melalui KUBE tidak menentu dan tidak rutin.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan melihat adanya beberapa faktor penghambat mengenai Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam mengatasi kemiskinan, maka peneliti merekomendasikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Sosial terkait perlu memperhatikan kembali anggaran untuk menjalankan program KUBE agar anggota KUBE mudah mengembangkan usahanya dan dapat menyiapkan tempat bagi anggota untuk menjalankan program KUBE.
2. Dinas Sosial perlu mengawasi keaktifan anggota KUBE dengan melakukan absensi kehadiran pada setiap pertemuan dan memberikan sanksi bagi yang tidak hadir. Selain itu, penting untuk mengapresiasi kerja anggota. Upaya ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab anggota dalam

berkontribusi secara aktif dan meningkatkan semangat anggota menjalankan KUBE.

3. Bagi Dinas Sosial sebaiknya mengadakan pelatihan yang mendukung perkembangan KUBE dan mengikutsertakan anggota, tidak hanya ketua saja agar menambah pengetahuan dan keterampilan seluruh anggota KUBE.
4. Bagi pendamping KUBE sebaiknya selalu mengawasi pelaksanaan program dan anggota juga harus berkomunikasi dengan pendamping jika ada keluhan dalam pelaksanaan program KUBE sehingga bisa saling mencari solusi yang tepat terhadap suatu masalah atau kendala.

Daftar Pustaka

- Anggraini, W., Roeliana, L., & Suratman, S. (2022). Evaluasi Program E-Warong Kube Pkh Berdasarkan Permensos Ri Nomor 8 Tahun 2017 Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Bengkulu (Studi pada Kecamatan Muara Bangkahulu). *Jurnal Governance dan Administrasi Publik*, 6(1), 11-20. DOI : <https://doi.org/10.31186/IJPPA>
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Badan Pusat Statistik Kota Samarinda. 2024. Jumlah Penduduk Miskin menurut Kecamatan di Kota Samarinda 2022-2023. Diakses pada 27 Oktober 2024 pada <https://samarindakota.bps.go.id/id/statistics-table/1/NDY1IzE=/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kecamatan-di-kota-samarinda--2022-2023.html>
- Bridgman, P, dan Davis G. 2000. *The Australian Policy Handbook*. Australia : Allen & Unwin
- Igirisa, Irawaty. 2022. *Kebijakan Publik Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris*. Yogyakarta : Tanah Air Beta. <https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/9888/BUKU-Kebijakan-Publik-Suatu-Tinjauan-Teoritis-dan-Empiris.pdf>
- Maipita, Indra. 2014. *Mengukur Kemiskinan & Distribusi Pendapatan*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN. <https://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/19488>
- Miles, M.B, Huberman, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications*. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin
- Suarga, S. 2019. Hakikat, Tujuan Dan Fungsi Evaluasi Dalam Pengembangan Pembelajaran. *Inspiratif Pendidikan*, 8(1), 327-338. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Inspiratif-Pendidikan/article/view>
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Lukman Offset
- Thoha, C. 2003. *Teknik Evaluasi Pendidikan*, Jakarta : PT Raja Grafindo